

# Lagi, Menyoal Kredibilitas Ma'ruf Amin

Penulis: Gantyo Koespradono, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Pada:  
Sabtu, 08 Sep 2018, 15:40 WIB **OPINI**

<http://mediaindonesia.com/read/detail/183421-lagi-menyoal-kredibilitas-maruf-amin>



SAAT Presiden Joko Widodo menyebut nama KH Ma'ruf Amin sebagai sosok yang akan mendampingi menjadi calon wakil presiden periode 2019-2024 minggu pertama Agustus lalu, banyak orang yang tidak menyangka, bahkan terkejut.

Sangat mungkin Mahfud MD, tokoh yang disebut-sebut telah disiapkan menempati posisi itu, juga terkejut, sebab ia tidak menyangka, Jokowi dan sembilan partai koalisi akhirnya memercayakan Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Padahal Mahfud telah menyiapkan diri menuju kontestasi Pilpres 2019 mendampingi Jokowi.

Bertubi-tubi pesan berupa pertanyaan via Whats App masuk ke ponsel saya. Seorang ibu bertanya seperti ini: "Kenapa sih Ma'ruf Amin yang dipilih?"

Ibu yang selalu mengikuti perkembangan politik itu kembali bertanya dengan agak nyinyir: "Apa nggak salah Jokowi memilih cawapres yang sudah tua, sarungan pula? Apakah masih mampu? Kapan dia pakai celana panjang?"

Saya percaya sampai hari ini masih banyak anggota masyarakat yang mempersoalkan dan mempertanyakan kemampuan dan kredibilitas Ma'ruf Amin.

Tak bisa dimungkiri ada pula yang meragukan nasionalisme kebangsaan Ma'ruf. Mereka bertanya-tanya, bisakah dia diandalkan untuk mengedepankan serta menjaga pluralisme dan kebinekaan bersama Jokowi?

Wajar jika mereka memersoalkan kredibilitas Ma'ruf Amin dalam soal yang satu itu (pluralisme-kebinekaan), sebab ketika Pilkada DKI Jakarta digelar tahun lalu, ia dekat dengan gerakan brutal serial nomor togel.

Pada saat itu, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin mengeluarkan fatwa tentang "penistaan" agama dan memosisikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai korban, sehingga para lawan Ahok melegitimasi fatwa MUI itu untuk terus memfitnah Ahok, dan ujung-ujungnya Ahok dipenjara.

Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak saja melukai Ahok, tetapi juga menodai demokrasi. Pilkada di Jakarta benar-benar wujud demokrasi yang paling buruk di Indonesia.

Amit-amit, jangan sampai peristiwa itu terulang di negeri ini, apalagi di saat kita menghadapi Pemilu Serentak 2019 yang di dalamnya ada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Pada mulanya, lewat tekanan dan agitasi yang bermotifkan "asal bukan Ahok", Ma'ruf Amin dianggap atau dicurigai berada di dalam gerakan atau aksi mencoreng demokrasi itu.

Namun, dalam perjalanan berikutnya, saya yakin batin Ma'ruf bergejolak bahwa selama ini ia telah berada pada kelompok atau tempat yang salah.

Informasi yang saya peroleh, Ma'ruf Amin diam-diam menjenguk Ahok yang mendekam di balik jeruji Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Setelah itu, Ma'ruf Amin lebih kooperatif kepada pemerintahan Jokowi. Ia bahkan "pasang badan" ketika Jokowi diserang pihak lawan, terutama sesepuh PAN, Amien Rais.

Informasi A-1 yang saya peroleh, Ma'ruf Amin beberapa kali secara diam-diam juga bertemu dengan sejumlah tokoh yang sangat peduli dengan utunya NKRI, antara lain Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Belakangan, saat memperkenalkan diri sekaligus memberikan pembekalan kepada para calon anggota legislatif (dalam acara Pekan Orientasi Caleg DPR-RI NasDem) di Jakarta, Minggu (2 September), Ma'ruf Amin berterus terang bahwa ia pernah bertemu dua kali dengan Surya Paloh.

Kesadaran politik Ma'ruf Amin seperti itulah yang kemudian saya jadikan argumentasi dalam tulisan saya di portal opini Seward berjudul "Ma'ruf Amin Layak Menjadi Cawapres Jokowi".

Saya menulis opini itu tiga bulan sebelum Jokowi dan sembilan partai pendukung memilih dan menetapkan Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi. Tak percaya, tapi nyata.

Saat Partai NasDem mengundangnya untuk hadir dan berbicara dalam acara Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif, saya menduga banyak kader NasDem -- tidak kecuali para caleg -- yang masih memersoalkan kredibilitas Ma'ruf Amin.

Saya memaklumi, sebab banyak yang belum mengenal betul siapa sebenarnya Rois Am Nahdlatul Ulama (NU).